

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus dapat diwujudkan melalui pembangunan yang berkesinambungan. Pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapai kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal (Depkes RI, 2009)

Menurut peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2014, pusat kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Upaya kesehatan yang dilakukan secara menyeluruh meliputi peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Dalam penyelenggaraan upaya kesehatan diperlukan perbekalan kesehatan yang meliputi sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya. Unuk sediaan farmasi meliputi bahan obat, obat tradisional dan kosmetik (Siregar dan Amalia, 2003).

Pelayanan kefarmasian di puskesmas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan upaya kesehatan, yang berperan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian di Puskesmas harus mendukung tiga fungsi pokok puskesmas, yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, dan pusat pelayanan kesehatan strata pertama yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat (Menkes RI, 2016).

Pelayanan kefarmasian merupakan kegiatan yang terpadu dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah obat dan masalah yang

berhubungan dengan kesehatan. Tuntutan pasien dan masyarakat akan peningkatan mutu pelayanan kefarmasian, mengharuskan adanya perluasan dari paradigma lama yang berorientasi kepada produk (*drug oriented*) menjadi paradigma baru yang berorientasi pada pasien (*patient oriented*) dengan filosofi Pelayanan Kefarmasian (*pharmaceutical care*) (Permenkes, 2014).

Pelayanan kefarmasian di puskesmas meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai dan kegiatan pelayanan farmasi klinik. Kegiatan tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia dan sarana dan prasarana (Permenkes, 2016).

Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di puskesmas minimal harus dilaksanakan oleh 1 (satu) orang tenaga apoteker sebagai penanggung jawab, yang dapat dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian sesuai kebutuhan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, yang dimaksud dengan apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian. Tenaga teknis kefarmasian merupakan tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri dari sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi dan tenaga menengah farmasi atau asisten apoteker.

Pentingnya pengelolaan obat di apotik dalam mencapai pelayanan kesehatan yang optimal di puskesmas, maka pada proses pengelolaan obat perlu diawasi untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dalam pelaksanaan oprasionalnya sehingga dapat segera dilakukan tindakan perbaikan untuk hal pelaksanaan pengelolaan obat yang masih dianggap belum optimal (Guswani, 2015).

Penelitian oleh Soeprijanto (2011), tentang evaluasi manajemen pengelolaan obat di Puskesmas Rawat Inap Kabupaten Prubalingga bahwa puskesmas dalam melakukan perencanaan masih tergolong tidak baik. Stok optimum tidak terdaftar pada kartu stok dan masih terdapat permintaan obat diluar DOEN sebesar 84,51%. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya evaluasi pengelolaan obat dalam menjamin

ketersediaan obat di pelayanan kesehatan akan menjaga citra pelayanan kesehatan tu sendiri.

Hasil penelitian oleh Asnawi dkk (2019), tentang analisis manajemen pengelolaan obat di Puskesmas Wolang bahwa manajemen pengelolaan obat di Puskesmas Wolaang belum sesuai dengan permenkes no 74 tahun 2016 tentang pelayanan kefarmasian karena ada beberapa faktor seperti penyimpanan obat, penarikan dan pemusnahan obat serta pemantauan dan evaluasi yang tidak sesuai dengan pedoman pengelolaan obat. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan obat dapat dipakai sebagai proses penggerakkan dan pemberdayaan semua sumber daya yang potensial untuk dimanfaatkan dalam rangka mewujudkan ketersediaan obat setiap saat dibutuhkan untuk operasional yang efektif dan efisien

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di Puskesmas Pilolodaa, dilihat dari segi sumber daya manusia yang ada sangatlah kurang, dimana kurangnya tenaga kefarmasian berupa tenaga teknis kefarmasian yang membantu apoteker, sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan obat yang ada di Puskesmas Pilolodaa. Oleh karena itu akan dilakukan evaluasi terhadap sumber daya dan manajemen pengelolaan obat yang ada di puskesmas Pilolodaa.

Apabila puskesmas tidak mampu merencanakan dan melaksanakan manajemen obat dengan baik maka puskesmas tersebut tidak mampu mencapai titik keberhasilan. Kegagalan manajemen logistik akan menurunkan kualitas pelayanan puskesmas sehingga kepuasan pasienpun juga akan menurun.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana evaluasi sumber daya dan manajemen pengelolaan obat yang berada di Puskesmas Piloloda'a periode 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengevaluasi sumber daya dan manajemen pengelolaan obat yang berada di Puskesmas Piloloda'a Kota Gorontalo periode 2019.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengevaluasi sumber daya di Puskesmas Piloloda'a Kota Gorontalo periode 2019.
2. Untuk mengevaluasi manajemen pengelolaan obat di Puskesmas Piloloda'a Kota Gorontalo periode 2019 berdasarkan Permenkes No. 74 tahun 2016

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagi Peneliti

Sebagai pembelajaran bagi peneliti dalam melakukan suatu penelitian dan menambah wawasan bagi peneliti khususnya yang berkaitan dengan manajemen pengelolaan obat yang ada di Puskesmas.

2. Bagi Institusi Pendidikan

Untuk institusi jurusan farmasi UNG, diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah wawasan ataupun pengetahuan bagi para pembaca khususnya mahasiswa/mahasiswi farmasi UNG.

3. Bagi Puskesmas

Dengan penelitian ini diharapkan Puskesmas Piloloda'a dapat memperoleh informasi yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan evaluasi atau peningkatan kualitas melalui adanya penelitian ini.